

## POSO TERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com>

Kabupaten Poso meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik Se-Sulawesi Tengah melalui inovasi “Mogombo Lipu”. Prestasi membanggakan tersebut diterima langsung Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu, dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, H. Longki Djanggola, pada pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)<sup>i</sup> Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Santika Palu.

Penilaian tersebut didasari Kabupaten Poso memiliki perencanaan, capaian serta inovasi-inovasi pembangunan yang terbaik se-Sulawesi Tengah dengan melihat adanya pencapaian kerangka dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)<sup>ii</sup> khususnya inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, seperti pendekatan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang dilakukan dengan melibatkan secara langsung seluruh perwakilan masyarakat, mulai dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat hingga pada tokoh-tokoh yang dinilai sangat memberikan pengaruh dalam masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan inovasi “Mogombo Lipu” sehari sebelum pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan.

Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu, usai menerima penghargaan tersebut mengatakan, pencapaian terbaik ini tidak terlepas dari peran semua *stakeholder*<sup>iii</sup> yang ada di Kabupaten Poso. “Yang paling utama dalam bekerja adalah kita harus tetap fokus pada pekerjaan kita, apabila kita tidak fokus maka tentunya *output* yang akan dihasilkan menjadi hal yang biasa saja. Tetap kompak dalam melakukan pekerjaan yang terbaik bagi masyarakat sehingga yakin dan percaya, semua cita-cita yang kita dambakan untuk Tana Poso dapat terwujud,” ungkapnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas diwakili Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Dr Ir. Subandi, mengatakan, Kabupaten Poso yang berhasil masuk dalam finalis 10 besar peraih PPD tingkat Nasional ini, juga mampu membuktikan bahwa perubahan yang ditampilkan oleh Kabupaten Poso di tahun-tahun terakhir ini dapat membuka mata bagi orang luar. “Kabupaten Poso memang patut untuk diperhitungkan sebagai daerah yang benar-benar serius dalam memajukan daerahnya baik itu lewat perencanaan-perencanaan terbaik serta inovasi-inovasi yang diberikan dalam proses pembangunan dengan keunikan yang dimiliki oleh wilayah itu sendiri,” ujar Subandi.

Kabupaten Poso berhasil mengalahkan 12 Kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah lainnya untuk maju bersaing dalam meraih PPD Tingkat Nasional tahun 2019 dan akan menerima hasilnya pada saat pelaksanaan Musrenbang Nasional di Jakarta nanti. Setelah menerima kunjungan Tim Penilai PPD Bappenas pada beberapa waktu yang lalu dengan mengikuti berbagai proses yang salah satunya lewat verifikasi data secara langsung dimana Tim Penilai hadir di Kabupaten Poso untuk melihat kondisi terkini Kabupaten Poso berdasarkan data yang telah diajukan dan juga telah melakukan wawancara atau dialog dengan masyarakat dan jajaran Pemerintah Daerah serta *stakeholder* lainnya, saat ini Kabupaten Poso masih akan terus dipantau perkembangannya oleh Pemerintah Pusat.

Sebelumnya, melalui visi misi yang tertuang dalam Pemerintahan Darmin-Samsuri yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan desa melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur juga menerapkan inovasi berbasis Teknologi Informasi (*E-Planning*). Kontribusi Kabupaten Poso dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah meningkat sebesar 6,36 persen pada 2017 dan merupakan peringkat ke-5 dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Hal ini pula yang menjadi salah satu kriteria penilaian mendasar Kabupaten Poso menerima penghargaan atas capaian pembangunan yang berhasil dilakukan.

Hasil kerja nyata yang tidak saja hanya mampu dilihat secara fisik baik dari penataan pembangunan di Kabupaten Poso namun juga penghargaan ini tentunya melihat adanya proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara matang dan proposional sesuai dengan keunikan yang dimiliki Kabupaten Poso. Dengan keluarnya Poso sebagai yang terbaik di Sulawesi Tengah dalam perencanaan pembangunan, maka daerah ini akan mewakili provinsi pada kompetisi PPD Tingkat Nasional tahun 2019.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Poso paling berinovasi dalam perencanaan pembangunan daerah di Sulteng*”, Rabu, 10 April 2019.
2. <https://utarapost.co.id>, “*Poso Terima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Sulteng*”, Selasa, 9 April 2019.

#### **Catatan:**

1. Sejak tahun 2011, Kementerian PPN/Bappenas secara rutin memberikan Anugerah Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Namun, mulai 2018, penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penilaian penghargaan tersebut kini lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah. PPD diberikan kepada tiga provinsi terbaik, tiga kabupaten terbaik dan tiga kota terbaik. Penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan profesional, akademisi serta praktisi pembangunan. Objek dan ruang lingkup penilaian mencakup dokumen RKPD, proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

2. Kriteria dan indikator penilaian meliputi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penganggur, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator ketimpangan rasio gini serta Indeks Ketimpangan Wilayah. Penilaian juga mencermati tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD terkait visi dan misi daerah, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD dengan sasaran prioritas nasional RKP, juga terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan program prioritas, dan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD dengan pagu anggaran.
3. Selain itu, penilaian juga berdasarkan pada tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, dukungan program prioritas daerah RKPD terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP, dukungan program prioritas daerah RKPD terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP, dukungan program prioritas daerah RKPD terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP, serta tersedianya dukungan program prioritas daerah terhadap arah kebijakan prioritas nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Kecakapan dalam melayani publik, mengawal keamanan dan ketertiban, mengelola keuangan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga menjadi indikator penilaian.

---

<sup>i</sup> Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

<sup>ii</sup> Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

<sup>iii</sup> Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/ perusahaan dan isu/ permasalahan yang sedang diangkat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti stakeholder adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan.